

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Secara umum Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat¹.

Isu *Good Corporate Governance* saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, khususnya di kalangan ekonomi dan pelaku bisnis di Indonesia. Sejak Krisis keuangan di berbagai negara khususnya Indonesia pada tahun 1997, yang akhirnya berubah menjadi krisis keuangan Asia yang terlihat sebagai akibatnya lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di negara-negara Asia. Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis tersebut adalah buruknya praktik *Corporate Governance*. Karena hal tersebut *Good Corporate Governance* akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis tersebut.² Baik dan buruknya kinerja perusahaan dapat dinilai dengan tata kelola perusahaan tersebut. Tata kelola

¹ Susana Iriyani, *Penerapan Tata Kelola Perusahaan*, www.e-learning community.blog.com, 2018.

² R.G, Suprayitno, Indaryanto, K,G, Yasni, S, Krismatono, D, Rita, L, Rahayu, "Komitmen Menegakkan *Good Corporate Governance*," *The Indonesian Institute For Corporate Governance*, (Jakarta, Indonesia, 2004).

perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.³

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Konsep pemerintah terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) cukup beralasan. Bulan Juni 2006 yang lalu, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* merilis Persepsi Standart *Corporate Governance*.⁴

Mekanisme komposisi yang akan digunakan dalam GCG dalam penelitian ini adalah Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Proporsi dewan komisaris independen adalah wakil dari pemegang saham minoritas yang bertanggungjawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan perusahaan dengan diproporsikan yaitu Komposisi dewan komisaris yang secara umum diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung dari laporan keuangan, hal ini sangat penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kurangnya kepercayaan investor. Ukuran dewan

³ H.Sri, Sulistyanto dan Rika Lidyah, "*Good Governance : Antara Idealisme Dan Kenyataan, Modus*, Vol. 14 (1), Februari, 2002.

⁴ IAN & BPKP, *Pelayanan Publik* (Malang: CV Cita Malang, 2013), h. 8.

komisaris menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh efektif tidaknya pengawasan kinerja manajemen. jumlah dewan komisaris yang relatif kecil dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam memonitor manajer. Jumlah dewan komisaris yang terlalu besar (dalam hal ini Jansen menyebutkan lebih dari tujuh orang) tidak dapat berfungsi secara optimal dan akan lebih mudah dikontrol oleh manajer, terutama karena dewan komisaris sendiri disibukkan oleh masalah koordinasi. Jika manajer dapat mengontrol dewan komisaris serta adanya asimetri informasi maka akan leluasa bagi manajer melakukan manajemen laba.⁵ Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen terhadap manajemen perusahaan maka diharapkan akan memperkuat pengaruh nilai perusahaan sehingga akan tercipta tata kelola perusahaan yang kuat karena komisaris independen bertindak sebagai pihak independen bebas dari tekanan kepentingan.⁶

Komite audit berdasarkan peraturan BI No 8/4/PBI/2006 menyatakan tentang tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan beberapa kasus pelaporan keuangan telah menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan untuk meminimalkan manajemen laba. Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Jadi, teori ini timbul pada saat keinginan dan tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan, dan melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent* adalah hal yang sulit bagi *principal*.

Manajemen Laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Para pemakai laporan keuangan di mungkinkan akan mengambil keputusan yang salah di karenakan mereka memperoleh informasi keuangan yang

⁵ Ma'ruf, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)" Thesis, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).

⁶ Nur Indah Indiani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Penerapan GCG Sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, vol. 4, (2010).

salah.⁷ Menurut Healy dan Wahlen 1998 manajemen laba mengandung beberapa aspek yaitu:

- a. Intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui penggunaan *judgment*, misalnya *judgment* yang digunakan untuk mengestimasi peristiwa-peristiwa ekonomi dimasa depan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.
- b. Tujuan manajemen laba adalah untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki informasi lebih yang tidak dapat diakses oleh pihak lainnya.⁸

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham, melalui peningkatan manajemen laba. Peningkatan manajemen laba tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan bisnis.

Dalam penelitian ini nilai perusahaan berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara *Good Corporate Governance* dan manajemen laba, karena dengan prinsip yang dimiliki nilai perusahaan ditunjukkan oleh harga saham perusahaan yang mencerminkan keputusan investasi, pembelanjaan dan deviden. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, sebaliknya semakin rendah harga saham, maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut.⁹

Nilai perusahaan adalah nilai laba masa yang akan datang yang diekspektasi yang dihitung kembali dengan suku bunga yang tepat. Nilai perusahaan merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan perusahaan untuk jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan dengan meminimumkan biaya modal perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebelum

⁷ Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im, "Manajemen Laba," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Indonesia* vol.15, no.4, 424-441 (2000).

⁸ Healy, P.M & Wahlen, J.M,A, *Review Of The Earnings Management Literature and Its Implications For Standard Setting*, 1998.

⁹ Van Home & James, C, *Fundamental Of Financial Management* (New York: Prentice Hall, 1995), h.16-17.

investor melakukan investasi saham pada sebuah perusahaan, mereka akan membuat penilaian saham terlebih dahulu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal. Terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (*book value*), nilai pasar (*market value*) dan nilai intrinsik (*intrinsic value*). Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Penilaian saham perusahaan ini bertujuan agar investor mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi saham karena dapat membantu investor untuk mengetahui saham mana yang bisa menguntungkan dan yang tidak menguntungkan.¹⁰

Standart pengukuran nilai perusahaan dapat dilakukan melalui pengukuran *Price to Book Value* (PBV) yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Perusahaan yang memiliki manajemen baik maka diharapkan PBV dari perusahaan setidaknya 1 atau di atas dari nilai buku (*overvalued*), dan jika angka PBV dibawah 1 maka dapat dipastikan bahwa harga pasar saham tersebut lebih rendah dari pada nilai bukunya (*undervalued*).¹¹ PBV yang rendah mengindikasikan adanya penurunan kualitas dan kinerja fundamental emiten yang bersangkutan.

Berikut penelitian yang sudah dilakukan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba antara lain *Good Corporate Governance* yang terdiri dari komposisi Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dengan Nilai Perusahaan sebagai variabel *moderating* . Variabel - variabel dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga perlu diteliti kembali.

Pada tesis Weldy Maulana dengan variabel independen yaitu GCG yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen

¹⁰ Dewa Kusumawijaya Kadek Oka, “Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia” (Tesis, Denpasar: Universitas Udayana, 2011).

¹¹ Arief Sugiono, *Panduan Praktis Dasar Analisa Keuangan Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Grasindo, 2016).

laba. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian *moderating* dengan uji residual menunjukkan bahwa variabel Nilai Perusahaan bukan merupakan variabel *moderating*, yaitu tidak mampu memoderasi hubungan variabel *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba.¹²

Artinya besar atau kecilnya Dewan Komisaris dalam perusahaan bukan menjadi jaminan bahwa dalam perusahaan tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jumlah seluruh anggota komisaris yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen belum dapat mengurangi perilaku manajer dalam memaksimalkan kepentingan pribadinya. Dan komite audit tidak mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Pada jurnal Afifa Nabila Daljono menunjukkan yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. artinya bahwa dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Semakin besar proporsi dewan komisaris eksternal maka semakin kecil *earning management*. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel aktivitas komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini diduga dikarenakan pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak berfokus dalam membahas masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pembentukan *Good Corporate Governance*. Komite audit yang sering

¹² Weldy Maulana, "Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," *Tesis* (2017): 1–129.

melakukan rapat belum tentu dalam rapat tersebut mampu menghasilkan keputusan atau peraturan yang dapat meminimalisir manajemen laba.¹³

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Pada jurnal Eva Rosa Dewi S dan Moh. Khoiruddin menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan sekedar untuk memenuhi ketentuan formal saja tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG), sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat atau bahkan menurun. Kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif.¹⁴

Berdasarkan data yang diambil dari www.kemenperin.go.id terkait pertumbuhan industri di Bursa Efek Indonesia tahun 2019, sektor Industri Dasar dan Kimia menempati posisi teratas pada pertumbuhan industri di Indonesia. Sektor industri dasar & kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% year-to-date (ytd). Industri manufaktur memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara paling besar sekitar Rp 335 triliun yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) Rp185 triliun dan cukai Rp150 triliun. Sejak awal tahun 2017, khusus industri dasar & kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Sektor industri dasar dan kimia merupakan salah satu bagian dari industri manufaktur yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian

¹³ Afifa Nabila and Daljono, "Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba," *Diponegoro Journal of Accounting*, (2013): 99–108.

¹⁴ Eva Rosa Dewi Sutino and Moh Khoiruddin, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013," *Management Analysis Journal* 5, no. 3 (2016): 156–166.

di Indonesia, karena sektor industri dasar dan kimia menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua yaitu sebesar 19,9% setelah industri makanan dan minuman yang menyumbang pertumbuhan sebesar 62,5% (Bappenas.go.id). Sektor ini memproduksi bahan baku dasar dan bahan-bahan kimia. Sektor ini bisa dikatakan sektor yang bertumbuh karena permintaan yang berubah-ubah setiap tahunnya. Adapun contoh dari sektor Industri dasar dan kimia adalah semen, plastik dan kemasan, kertas, kimia, pakan ternak, kayu & pengolahannya, keramik & kaca, serta logam dan sejenisnya.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut perlu adanya Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak Manajemen Laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut, hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Selain itu, besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian (*monitoring*) terhadap manajemen; dan bahwa ada atau tidak adanya komite audit dalam suatu perusahaan belum tentu dapat mengurangi manajemen laba, hal ini dikarenakan mengingat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia. Tujuan perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman tersebut, apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak.¹⁵ Kemudian untuk memperkuat mengapa penelitian ini dilakukan, berikut data yang akan ditampilkan di dalam tabel sehingga pembaca mengetahui perusahaan mana saja yang mempunyai Proporsi dewan komisaris independen dan komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen laba dengan Nilai perusahaan sebagai variabel *moderating*.

¹⁵ Zuhri M. Nawawi, *Kewirausahaan, Teori Motivasi Dan Aplikasi* (Medan, 2020), h. 85.

Tabel 1. 1

**Data Komposisi Ratio Good Corporate Governance dan Manajemen
Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating
Pada Perusahaan Manufaktur 2015-2020**

NO	Kode	Tahun	Manajemen Laba	Good Corporate Governance				Nilai Perusahaan
				Anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	proporsi dewan komisaris independen	Komite Audit	
1	ARNA	2015	0,002	1	3	3,000	4	4,103
		2016	0,004	1	3	3,000	4	4,027
		2017	0,004	1	3	3,000	3	2,439
		2018	-0,002	2	4	2,000	3	2,812
		2019	0,001	2	4	2,000	3	2,720
		2020	0,002	2	4	2,000	3	3,830
2	GDST	2015	0,003	2	1	0,500	3	1,110
		2016	0,002	2	1	0,500	3	0,810
		2017	0,004	2	1	0,500	3	1,110
		2018	0,005	2	1	0,500	3	1,260
		2019	0,005	2	1	0,500	3	0,600
		2020	0,006	2	1	0,500	3	0,530
3	INAI	2015	0,017	4	2	0,500	3	0,535
		2016	0,004	4	2	0,500	3	0,792
		2017	-0,005	4	2	0,500	3	0,863
		2018	0,008	3	1	0,333	3	0,855
		2019	-0,011	3	1	0,333	3	0,873
		2020	0,047	3	1	0,333	3	0,892
4	LION	2015	0,003	3	1	0,333	3	1,201
		2016	0,002	3	1	0,333	3	1,161
		2017	0,000	3	1	0,333	3	0,880
		2018	0,004	3	1	0,333	3	0,744
		2019	-0,002	3	1	0,333	3	0,519
		2020	0,002	3	1	0,333	3	2,492
5	LMSH	2015	0,003	3	1	0,333	3	0,491
		2016	0,003	3	1	0,333	3	0,483
		2017	0,008	3	1	0,333	3	0,474
		2018	-0,002	3	1	0,333	3	0,42
		2019	0,000	3	1	0,333	3	0,402
		2020	0,006	3	1	0,333	3	0,398
6	PICO	2015	-0,002	3	1	0,333	3	0,294
		2016	0,004	3	1	0,333	3	0,475
		2017	0,012	3	1	0,333	3	0,463
		2018	0,000	3	1	0,333	3	0,474
		2019	-0,001	3	1	0,333	3	3,203
		2020	0,001	3	1	0,333	3	3,256
7	AGII	2015	0,006	6	2	0,333	3	0,532
		2016	0,023	6	2	0,333	3	0,552
		2017	0,002	6	2	0,333	3	0,662
		2018	0,003	6	2	0,333	3	0,654
		2019	0,004	6	2	0,333	3	0,599
		2020	-0,002	6	2	0,333	3	0,623
8	DPNS	2015	-0,001	3	1	0,333	3	0,531
		2016	-0,001	3	1	0,333	3	0,503
		2017	0,002	3	1	0,333	3	0,433
		2018	0,000	2	1	0,500	3	0,377
		2019	-0,002	2	1	0,500	3	0,298
		2020	0,001	3	1	0,333	3	0,280
9	SRSN	2015	0,004	8	3	0,375	3	0,890
		2016	0,000	8	3	0,375	3	0,850

		2017	-0,004	8	3	0,375	3	0,730
		2018	0,005	8	3	0,375	3	0,850
		2019	0,004	6	2	0,333	3	0,830
		2020	0,006	6	2	0,333	3	0,550
10	AKPI	2015	0,003	6	2	0,333	3	0,560
		2016	-0,005	6	2	0,333	3	0,430
		2017	0,000	6	2	0,333	3	0,420
		2018	0,007	6	2	0,333	3	0,400
		2019	-0,002	6	2	0,333	3	0,540
		2020	0,002	6	2	0,333	3	0,440
11	BRNA	2015	0,003	4	2	0,500	3	0,669
		2016	0,005	4	2	0,500	3	1,047
		2017	0,006	5	2	0,400	3	1,423
		2018	0,002	5	2	0,400	3	1,046
		2019	-0,001	5	2	0,400	3	1,057
		2020	0,002	5	2	0,400	3	1,086
12	IMPC	2015	-0,001	2	1	0,500	3	4,076
		2016	0,002	2	1	0,500	3	4,042
		2017	0,003	2	1	0,500	3	4,087
		2018	0,001	2	1	0,500	3	3,311
		2019	0,002	2	1	0,500	3	3,604
		2020	0,003	2	1	0,500	3	3,942
13	TRST	2015	-0,002	4	2	0,500	3	0,440
		2016	-0,001	4	2	0,500	3	0,450
		2017	0,001	3	1	0,333	3	0,540
		2018	0,002	3	1	0,333	3	0,490
		2019	0,001	3	1	0,333	3	0,490
		2020	0,002	3	1	0,333	3	0,650
14	YPAS	2015	-0,001	3	1	0,333	3	3,900
		2016	-0,001	3	1	0,333	3	5,170
		2017	0,001	3	1	0,333	3	4,270
		2018	0,004	3	1	0,333	3	3,720
		2019	0,004	3	1	0,333	3	2,500
		2020	0,002	3	1	0,333	3	3,020
15	ALDO	2015	-0,005	3	1	0,333	3	1,670
		2016	0,001	3	1	0,333	3	1,460
		2017	-0,001	3	1	0,333	3	1,440
		2018	0,001	3	1	0,333	3	1,440
		2019	0,005	3	1	0,333	3	1,350
		2020	0,006	3	1	0,333	3	1,910
16	INCF	2015	0,007	1	1	1,000	3	1,590
		2016	0,004	2	1	0,500	3	1,410
		2017	0,005	2	1	0,500	3	1,410
		2018	0,003	2	1	0,500	3	2,170
		2019	0,005	2	1	0,500	3	3,120
		2020	0,002	2	1	0,500	3	7,500

Sumber: www.idx.co.id, diolah kembali.

Dari tabel 1.1 data diambil dari laporan keuangan perusahaan PT Manufaktur di BEI. Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya dipecah kedalam bentuk lembaran saham yang dijadikan bukti kepemilikan oleh pemilik yang menginvestasikan hartanya dalam perusahaan.¹⁶ Dari 39 perusahaan yang merupakan sampel Skripsi ini, peneliti menunjukan 16 dari perusahaan Sektor industri dasar dan kimia untuk memperkuat latar belakang masalah

¹⁶ Hendra Harmain, Dkk, *Pengantar Akuntansi 1* (Medan: CV Madenatera, 2017), h. 20.

kemudian peneliti mengolah kembali data yang diperoleh secara manual dan menghasilkan data seperti tabel tersebut.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen di sektor industri dasar dan kima pada perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) memiliki Proporsi dewan komisaris independen yang tertinggi dari keseluruhan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yaitu 3,000 untuk tahun 2015-2017 kemudian pada tahun 2018-2020 sebanyak 2,000. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak *opportunistic*.

Nilai manajemen laba tertinggi pada tahun 2015 dialami oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) dengan nilai 0,017. Nilai manajemen laba tertinggi pada tahun 2018 dialami oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) dengan nilai 0,008. Nilai manajemen laba tertinggi pada tahun 2018 dialami oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) dengan nilai 0,047. Jadi sepanjang pergerakan dari tahun 2015-2020 manajemen laba tertinggi terdapat di perusahaan PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI). Dengan adanya manajemen laba sebagai tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.

PBV di sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 4,103 ke 4,027 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 sebesar 2,439 ke 2,812 pada tahun 2018, dan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 2,720 ke 3,830. Menunjukkan adanya penguatan sebesar 0,076 dari penurunan tahun 2015-2016. Sebesar selisih kenaikan 1,11 pada 2019-2020. PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 3,900 ke 5,170 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 sebesar 4,270 ke 3,720 pada tahun 2018, dan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 2,500 ke 3,020. Menunjukkan adanya penguatan sebesar 4,27 dari kenaikan tahun 2015-2016. Sebesar selisih kenaikan

0,52 pada 2019-2020. PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF) mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 1,590 ke 1,410 pada tahun 2016, dan kenaikan di tahun 2017 sebesar 1,410 ke 2,170 pada tahun 2018, dan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 3,120 ke 7,500. Menunjukkan adanya penguatan sebesar 0,18 dari penurunan tahun 2015-2016. Sebesar selisih kenaikan 4,38 pada 2019-2020. Menurut Gultom dan Syarif menyatakan bahwa Nilai perusahaan dapat tercermin melalui harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti semakin tinggi juga nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Dari uraian di atas mendasari ketertarikan penulis untuk menganalisis apakah GCG dapat mempengaruhi terhadap manajemen laba serta nilai perusahaan sebagai variabel *moderating* yang dapat memperlemah atau memperkuat GCG dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur tersebut, untuk maksud tersebut penulis membuat penelitian atau skripsi dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI (Tahun 2015-2020)”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

B. Identifikasi Masalah

SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya malpraktik keuangan perusahaan di Asia yang saat ini akibat krisis keuangan tersebut terjadi buruknya praktik *Corporate Governance*.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di atas, Nilai Perusahaan (PBV) mengalami peningkatan sedangkan Manajemen Labanya mengalami penurunan pada tahun 2015-2020.
3. Terjadi proporsi Dewan Komisaris Independen yang cukup banyak namun Manajemen Laba yang mengalami kenaikan.
4. Terdapat dari penelitian terdahulu hasil Nilai Perusahaan yang tidak terbukti sebagai variabel *moderating* yang dapat memoderasi hubungan *Good Coporate Governance*.

C. Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini agar ruang lingkup peneliti tidak meluas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba. Data yang digunakan berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020.
2. Dari berbagai faktor atau karakteristik *Good Corporate Governance* yang akan digunakan, penelitian ini hanya dibatasi pada Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.
3. Nilai Perusahaan sebagai variabel pemoderasi untuk melihat apakah dapat memperkuat atau memperlemah *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
3. Apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba?
4. Apakah Nilai Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dengan Manajemen Laba?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- c. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba.
- d. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Nilai Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dengan Manajemen Laba.

2. Manfaat

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh GCG terhadap hubungan Manajemen laba dengan Nilai Perusahaan sebagai variabel moderating.

b. Bagi Universitas

penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka, wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain jika memiliki keinginan untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan organisasi terutama dalam tata kelola perusahaan dalam mengelolah perusahaan secara efisien.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.